

### **BAB III**

#### **PROGRAM KOLONISASI DI LAMPUNG**

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan tentang Perkembangan dan Pelaksanaan kolonisasi di Giesting. Sebelum membahas lebih dalam, pada Bab III ini, penulis akan menjelaskan tentang Pelaksanaan Kolonisasi di Lampung. Dengan demikian, akan penulis jabarkan menjadi beberapa sub bahasan mulai dari latar belakang program kolonisasi, pelaksanaan kolonisasi di Lampung, Giesting dan alasan pilihan *Indo-Europeesch Verbond* (I.E.V) dalam Pelaksanaan Kolonisasi tahun 1926.

#### **A. Latar Belakang Program Kolonisasi**

Perpindahan rakyat secara besar-besaran dari satu daerah ke daerah lain yang terjadi di hampir seluruh bagian dunia ini telah berjalan sejak dahulu kala. Perpindahan penduduk atau kolonisasi juga telah dilaksanakan di beberapa belahan Dunia. Kolonisasi yang pernah terjadi seperti perpindahan Bangsa-Bangsa Cropal di Benua Amerika dan Australia, pemindahan Bangsa Tionghoa lalu kemudian juga pemindahan Bangsa Eropa seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Belanda, Portugis, Inggris, dll di beberapa negara bahkan di Indonesia atau Nusantara.

Pemindahan penduduk ini dilaksanakan atas dasar pemenuhan kebutuhan suatu tempat, dikarenakan oleh beberapa alasan mendasar seperti kepadatan penduduk, pemerataan kondisi dalam suatu wilayah, kesukaran kesejahteraan, dan pemakmuran penduduk. Dengan pertimbangan kondisi yang sedemikian rupa tersebut, mengakibatkan timbulah dorongan atau rasa keinginan dari penduduk untuk melakukan perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sebuah tempat yang dituju untuk berpindah tersebut, tentunya harus memiliki kondisi yang lebih baik atau juga harus lebih luas dengan maksud untuk memenuhi tujuan hidup yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya ditempat yang lama. Perpindahan penduduk ini juga akibat dari kondisi perekonomian yang pelik disuatu daerah, sehingganya menjadi dorongan yang kuat oleh golongan masyarakat. Menurut fakta perjalanan sejarah yang terjadi, perpindahan penduduk juga pernah terjadi di Indonesia. Menurut perhitungan Raffles pada tahun 1815 jumlah penduduk Jawa hanya sekitarr 4,6 juta orang. Kemudian survey telah dilanjutkan di tahun 1905 oleh sensus penduduk yang

diselenggarakan, telah mencatat dan menunjukkan fakta bahwa terdapat 30,1 juta jiwa yang menduduki Pulau Jawa, sedangkan hanya sekitar 7,5 juta yang menduduki Pulau diluar Pulau Jawa atau Pulau lain. Banyak permasalahan yang timbul akibat dari tingkat kemlaratan dan perubahan-perubahan yang terjadi di pelosok daerah sebagai akibat dari ulah tangan perusahaan-perusahaan asing yang berkerja dibidang perkebunan kopi, tembakau, industri penghasil gula yang berakibat buruk terhadap perekonomian warga. (Hardjono, 1982).

Kepulauan Indonesia menjadi tanah yang cukup dalam hal kekayaan memberi hidup untuk rakyatnya, namun kondisi yang terjadi di Pulau Jawa kala itu tidak seimbang antara kondisi luas wilayah dan kenaikan jumlah jiwa yang membludak dikarenakan tingginya angka kelahiran dan minimnya penyebaran penduduk yang tidak merata di beberapa wilayah Indonesia selain pulau Jawa.

Kekayaan alam dan bentang luasnya daerah Indonesia yang tersebar di ribuan pulau, dapat mensejahterakan kehidupan seluruh rakyatnya, namun jumlah ketidak seimbangan antara produksi dan penyebaran penduduk yang terus menerus bertambah terjadi di Pulau Jawa, menjadikan ketidakseimbangan dan sisi pemerataan dan tidak dapat digunakan, karena minimnya kesempatan untuk mendapatkan dan memanfaatkan tenaga untuk bekerja. Melihat kondisi geografis Indonesia yang terbentang di beberapa ribu kepulauan Indonesia. Namun, faktanya persebaran penduduk yang terjadi pada waktu tempo dulu sekitar awal abad ke 19 menunjukkan bahwa, kepadatan penduduk sebagian besar terjadi di Pulau Jawa terutama pada masa Penjajahan Belanda. Berdasarkan data statistik tahun 1900 Penduduk Pulau Jawa telah mencapai angka 28. 746. 638 Jiwa, kemudian meningkat drastis pada 1920 mencapai angka 34. 984. 171 Jiwa. (Dahlan M. H. , 2014).

Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa tersebut pada zaman dahulu belum dinilai terlalu besar, hanya diperkirakan naik sekitar 2%, namun hal ini akan selalu dibandingkan dan disesuaikan dengan letak atau lokasi wilayah Pulau Jawa sendiri yang tidak terlalu luas, sehingganya tidak seimbang dengan letak ketersediannya luas tanah dan jumlah penduduk. Salah satu cara terbaik adalah melaksanakan kolonisasi atau memindahkan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

Kolonisasi merupakan sebuah program yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda dengan maksud memindahkan penduduk dari Jawa ke tanah

sabrang lainnya. Kolonisasi merupakan sebuah akibat dari dampak Politik Etis atau politik balas budi Pemerintahan Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia.

Alibasya (1981:113) menyatakan bahwa Kolonisasi atau *kolonisatieproof* dilaksanakan oleh sebuah komisi *Commise Voor Emigrate en Kolonisten Ban Imheemsen* (Komisi Pusat Emigran dan Kolonisasi Pribumi) di Hindia Belanda. Pelaksanaan kolonisasi ini didukung juga dengan adanya brosur yang berisi tentang ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa dengan luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Sementara itu di luar Pulau Jawa justru sebaliknya, jumlah penduduk relatif sedikit, sedangkan areal yang potensial untuk perkebunan dan pertanian masih sangat luas. (Dahlan M. H. , 2014)

Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kolonisasi bukan tanpa sebab, melainkan ada beberapa pengaruh yang lebih mendasar adalah melihat lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa yang semakin menipis dan sempit, sedangkan kepadatan penduduk Jawa yang terus meningkat. Disamping itu, melihat potensial Pulau sabrang yang sangat luas dengan jumlah pribumi yang sedikit, menambah semangat Pemerintah Hindia-Belanda untuk melakukan kolonisasi. Program perpindahan penduduk pada saat itu memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kolonisasi banyak diselenggarakan untuk mendapat tenaga kerja murah bagi perusahaan swasta di luar Jawa, sedangkan program kolonisasi diselenggarakan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan di luar Jawa. Pada masa Kolonial Belanda hasilnya adalah untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya yang diperoleh dari usaha dan kerja keras buruh yang dibayar dengan murah. Kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatar belakangi oleh beberapa hal:

1. Melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah.
2. Pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat penambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun.
3. Adanya kebutuhan Pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.

Kolonisasi merupakan salah satu dari program Politik Etis. Politik Etis atau politik balas budi adalah sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa Pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan pribumi. Politik ini pertama kali digagas dan disampaikan oleh Van De Venter yang menyebutkan tentang “hutang budi Negara Belanda kepada rakyat Bumi Putera. Kepada Parlemen Belanda, Van De Venter mengusulkan tentang politik hutang budi ini sebagai cara untuk membalas jasa dan budi Bangsa Indonesia yang sudah mengeluarkan banyak tenaga demi Bangsa Belanda. Van De Venter menegaskan tentang Pemerintah Belanda telah memiliki hutang budi yang begitu besar dan banyak dan harus dibayar kepada Rakyat Indonesia. (Syarif, M. , 2019)

Van De Venter telah memberikan gagasan untuk Politik Etis itu sendiri dengan tujuan balas budi. Politik Etis atau politik balas budi sengaja dicanangkan untuk menegakkan hak-hak kaum pribumi semasa Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di Indonesia. Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Di Hindia Timur pada tahun-tahun permulaan abad kedua puluh, orang telah mulai bekerja mengembangkan semangat politik etis. Di abad ke-19, sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kesejahteraan dan status pribumi. Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan kehidupan perekonomian dan pendidikan. Kemauan dari politik etis yang diberikan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia yang lemah secara adil”. (Susilo Agus et. al, 2018)

Seorang tokoh Belanda bernama Van De Venter yang terkenal sangat kejam dan bijak terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Belanda pernah menawarkan dan menyarankan bahwa pendidikan, irigasi dan emigrasi dapat memperbaiki keadaan ekonomi, keadaan sosial di Pulau Jawa. Dalam tulisan “*Een Ereschuld (Hutang Kehormatan)*”<sup>1899</sup>, Van De Venter (1857-1915), menyimpulkan bahwameskipun menyimpan banyak kecaman, akhirnya dua tahun kemudian politik etis ini menjadi haluan baru dan secara resmi menjadi politik kolonial, yang ditandai dengan pidato Ratu Wihelmina dihadapan Parlemen Belanda pada 17 September 1901.

“Sebagai Negara Kristen, negeri Belanda wajib memperbaiki kedudukan hukum-hukum orang-orang Kristen pribumi di Kepulauan Hindia, memberikan dukungan kuat pada misi Kristen, dan menanamkan pada seluruh sistem Pemerintahan dengan kesadaran bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk kawasan ini. ”

Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mulai memikirkan kemungkinan terlaksananya kolonisasi, yaitu penempatan petani-petani daerah yang padat penduduknya di Jawa, di desa-desa baru yang disebut “koloni” di daerah kosong di luar Pulau Jawa sebagai salah satu jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan. Awal mula terbentuknya Politik Etis berakar dari sebuah pemikiran akan masalah kemanusiaan dan kondisi ekonomi. Pada abad ke 19 banyak orang yang telah mengembangkan semangat dalam melakukan balas budi, bahkan sebagian orang atau kaum Belanda memiliki rasa prihatin terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat pribumi atau rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Politik Etis diharapkan mampu memberikan hak pribumi atau bangsa Indonesia yang lemah secara adil dan merata.

Pelaksanaan Politik Etis oleh Pemerintah kolonial Belanda sudah pasti tidak terlepas dari kepentingan kolonial Belanda. Politik Etis menuntun Bangsa Indonesia kearah kemajuan, namun tetap di bawah naungan penjajah Belanda. Politik Etis secara resmi ditetapkan pada 17 September 1901 pada saat Ratu Wihelmina naik tahta. Program Politik Etis ini sendiri terdapat tiga program unggulan yaitu : Irigasi, Imigrasi dan Edukasi. Ketiga program unggulan ini selama pelaksanaan banyak mengalami kegagalan dan keberhasilan. Seperti program Imigrasi yang terjadi selama beberapa tahun lamanya. Dalam hal ini, imigrasi lebih terfokus pada program kolonisasi pada masa Hindia Belanda.

*Max Havelar* (1860) dalam Levang (2003:9), beberapa cendekiawan liberal, sebaai perintis yang memperhatikan dunia ketiga, seperti Van De Venteer, Van Kol, dan Brooschoft membentuk kelompok penentang yang terkenal dengan nama *Ethici*. Berpegang pada politik “Kewajiban moral”, mereka berpendapat bahwa Belanda memiliki utang kehormatan atau utang budi pada jajahannya. Gerakan-gerakan yang terus digemakan dari ketiga tokoh Belanda tentang hutang kehormatan dan utang budi ini, menjadikan Pemerintah Belanda semakin memperhatikan beberapa aspek tersebut. Sehingga kemudian pada akhirnya Pemerintah Belanda menyelenggarakan Politik Etis sejak tahun 1900, dengan semboyan yang didengungkan dan digemakan adalah pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Ketiga program ini menjadikan program *Kolonisatie* pada tahun 1905 sebaai cikal bakal transmigrasi yang terjadi hingga masa kini. Menurut (Sjamsu 1960) ada tiga tahapan dalam pelaksanaan kolonisasi yaitu kolonisasi pertama ditahun 1905 hingga tahun 1911, kolonisasi kedua ditahun 1912 hingga 1922, dan kolonisasi tahap ketiga ditahun 1932 hingga tahun 1942.

a. Tahapan yang pertama ditahun 1905 hingga tahun 1911

Fase atau tahapan yang pertama ini termasuk dalam fase percobaan atau coba-coba dalam menyelenggarakan dan mencari dasar dalam pelaksanaan kolonisasi. Pada fase ini, Pemerintah kolonial menugasi Asisten Residen H. G Heijting, dari Karesidenan Kedu ke daerah-daerah luar Jawa.

Dalam hal ini penyelenggaraan kolonisasi fase ini, Heijting menghendaki supaya calon-calon kolonis harus terdiri dari petani yang sehat dan kuat untuk membangun suatu desa pertanian yang baik, berbeda dengan cara seleksi Van Diessel dimana ia berpendapat bahwa siapa saja bisa jadi kolonis pertanian yang baik asal dididik dengan baik dan benar.

Pada fase ini terdapat 500 keluarga yang mendapat jaminan hidup selama tahun pertama untuk meringankan biaya. Menurut (Pelzer, 1945:191) dalam (Levang, 2003:9) setiap penduduk yang mendapatkan subsidi, hendaknya mengajak sanak saudara mereka untuk melakukan hal yang sama, sehingga akan terjadi migrasi yang spontan.

Penyelenggaraan kolonisasi ppada fase percobaan kali ini dinilai sangat menghabiskan banyak pengeluaran, yang dikarenakan anggaran untuk kolonis begitu besar, dimulai dari anggaran keberangkatan, peralatan pendukung, alat untuk membangun tempat tinggal dan segala kebutuhan kolonis untuk penghidupannya. Oleh karena itu Pemerintah Belanda menghentikan program fase percobaan ini karena biaya yang mahal dalam penyelenggaraannya.

b. Tahapan yang kedua ditahun 1912 hingga tahun 1922

Pada tahapan kolonisasi fase kedua ini dikenal dengan sistem penyelenggaraan kolonisasi sistem hutang. Fase pinjaman bank atau pinjaman dari *Volksbank*. Guna mendukung pelaksanaan kredit kolonisasi, Pemerintah mendirikan *Lampongsche Volksbank* pada bulan maret 1911, pinjaman yang diberikan hanya boleh digunakan untuk membeli ternak, alat-alat pertanian serta mengelola tani atau kegiatan produktif serta bahan untuk membangun rumah

Menurut (Sjamsu, 1960) *Lampongsche Volksbank* adalah semacam bank Perkreditan Rakyat Lampung yang didirikan pada 13 Maret 1911. (Amboro, 2021:227).

Bank ini dikenal sebagai Bank kolonisasi, karena bank ini memberikan pinjaman kepada para kolonis sebagai modal untuk memulai kehidupan baru ditanah kolonis. Pada masa periode *Lampung Volksbank* kali ini para koloni atau rakyat hanya diperbolehkan mempergunakan uang kredit atau biaya kolonisasi

yang dipinjamkan hanya untuk membeli barang-barang yang bernilai untuk mendukung kepentingan pertanian, rumah tangga dan membeli hewan ternak.

Tujuan fase hutan gini diselenggarakan adalah untuk penghematan biaya kolonisasi, namun penyelenggaraan kolonisasi masih sama seperti sebelumnya. Pendirian *Lampung Volksbank* ini dimaksudkan Pemerintah Belanda agar biaya kolonisasi ditanggung oleh perintis. Dalam sistem ini, ternyata Pemerintah banyak menemukan kegagalan yang diakibatkan oleh kesalahan teknis. Pemberian pinjaman uang yang begitu loyal kepada kolonis mengakibatkan pengelolaan keuangan negara yang tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, pemeliharaan kesehatan, aspek pemilihan tanah, penetapan waktu, pemilihan pengelolaan perkebunan tidak dilaksanakan dengan baik. Ada faktor lain juga yang mempengaruhi pada sistem ini yaitu, kekusutan yang terjadi dalam pengelolaan organisasi yang mengakibatkan pemborosan biaya Pemerintah. Peminjaman ini kemudian menjadi sukar, sehingga pinjaman-pinjaman ini sedikit demi sedikit mulai dihapuskan. Kejadian ditahun 1926 diindikasikan kembali terjadi politik kecurangan dan korupsi yang melibatkan pimpinan ketua Bank Rakyat Lampung dalam oraktik korupsi ini. (Amboro, 2021:228).

Proses penyelenggaraan kolonisasi sistem bawon ini berakhir pada tahun 1929. Dalam Koran De Sumatra Post 09 Januari 1929 memberitakan selesainya penyelenggaraan kolonisasi dengan sistem hutang yang telah diinvestigasi kasus kecurangan-kecurangannya dari W. C Schalwijk, dan hingga pada akhirnya saat itu pula kolonisasi sistem hutang dihapuskan kemudian Bank Rakyat Lampung dilikuidasi, untuk semua kerugian dan kekurangan kerugian dibebankan kepada Pemerintah pusat.

c. Tahapan ketiga ditahun 1932 hingga tahun 1942

Sekitar tahun 1930an dimulailah fase baru dalam penyelenggaraan kolonisasi, pada fase ini dikenal dengan sistem bawon. Dalam kolonisasi sistem bawon ini dikenal dengan semboyan "*Niet voor niets*" (tidak ada yang cuma cuma).

Menurut Pelzer, (1946: 202) untuk memotong padi para kolonis menggunakan alat potong yang disebut dengan ani-ani, terdiri dari bilah pisau berukuran panjang 2 inci yang diikat melintang ke tongkat pendek. Penggunaan alat ini dianggap sebagai metode panen padi yang paling hati hati, tetapi tidak ekonomis dari sudut pandang jam kerja. Namun, praktiknya sudah mengakar sebagai tradisi Jawa.

Pada sistem bawon ini dilaksanakan dengan menghasilkan untung yang banyak dibandingkan dengan kolonisasi pada tahap-tahap sebelumnya. Pada sistem bawon ini diperuntukkan untuk pemberian modal yang kecil dan dengan hasil yang besar. Pada kolonisasi sistem bawon ini, mampu memindahkan 18.067 jiwa dalam satu tahun. Pada sistem bawon ini, Pemerintahan Belanda selalu menggembor-gemborkan untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik bagi para kolonis, namun fakta yang terjadi dilapangan sungguh mengecewakan, dimana banyak petani yang mengolah lahan dengan keringatnya sendiri tidak merasakan hasil yang maksimal, kebanyakan sebagian besar keuntungan sistem bawon untuk Pemerintah Belanda. Menurut Sjamsu (1960: 44) pada sistem bawon ini, para kolonis diawasi oleh pengurus desa. Setiap hari pendapatan bawon harus diserahkan kepada lurah supaya tidak dijual. Setiap keluarga setidaknya harus memiliki 5 pikul padi upah bawon sebelum bernagkat pindah ketanah yang ditentukan baginya, jika kurang dari 5 pikul, oleh pengurus kolonisasi diusahakan supaya keluarga itu dapat menerima secukupnya dengan jalan mengambil dari padi bawon lainya atau pemberian kolonis lama, karena jika persediaan kurang dari 5 pikul, mereka akan mendapatkan kesukaran kelak”.

Upah bawon yang mereka dapat dari kolonis lama harus mencukupi kebutuhan hidup ditanah kolonis baru. Para kolonis harus mempersiapkan segala kebutuhannya hingga waktunya mereka dapat memanen hasil padi mereka sendiri.

## **B. Pelaksanaan Kolonisasi di Lampung**

Sejarah transmigrasi di Indonesia dapat dimulai pada tahun 1905. Levang, (2003:11) menyatakan program *Kolonisatie* pada tahun 1905 sebagai cikal bakal transmigrasi yang terjadi hingga masa kini. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Dalam hasil penelitian Heyting dilakukan percobaan Kolonisasi (kolonisatieproof) dengan tujuan menetap, hingga pada akhirnya program kolonisasi ini terealisasi pada tahun 1905. Program kolonisasi pertama kali dilaksanakan di Lampung.

Menurut Sjamsu, (1960:5), pada tahun 1905 baru menyelenggarakan kolonisasi, namun pada sebelumnya Pemerintah Hindia Belanda telah menyelidiki beberapa daerah diantaranya Bengkulu, Sumatera Barat, Palembang, dan Lampung. Kemudian dipilihlah suatu daerah yang berada di Karesidenan Lampung, yang dekat dengan Teluk Betung dengan nama Gedong

Tataan, Daerah ini yang menjadi kolonisasi pertama di Indonesia yang kemudian disusul daerah-daerah lainnya. Gedong Tataan memiliki sisi keunggulan sendiri sehingga terpilih menjadi tempat kolonisasi pertama yang ada di Lampung. Gedong Tataan memiliki tanah yang datar wilayahnya, dekat dengan jalan raya, dan dekat dengan pulau Jawadan memiliki sumber air yang banyak dan cocok untuk persawahan alasan ini dikuatkan oleh tulisan (Amir, Ratnah. 2020:15).

Lembaga yang menyelenggarakan dan mengurus kolonisasi adalah sebuah komisi inter departemen yaitu *Centraal Commissie voor Emmigratie en Kolonisten van Inheemsen*. (Setiawan, N). Kolonisasi ini jugadipimpin oleh asisten-residen H. G Heyting bersama asisten-wedana dan dibantu oleh 2 orang mantri-irigasi. Dalam buku karya Patrice Levang (2003: 10) menyebutkan bahwa pada saat pelaksanaan kolonisasi di Gedong Tataan ini mendatangkan sebanyak 155 kepala keluarga dari Karesidenan Kedu (Jawa Tengah) ke Gedong Tataan, Lampung. Pada bulan November tahun itu didatangkan 155 keluarga kolonis dari Jawa. Dengan ini berdirilah kolonisasi Gedong Tataan, kolonisasi pertama Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kolonisasi yang diselenggarakan dengan sistem percobaan pertama dan fase percobaan sehingga kolonis melakukan kolonisasi di Karesidenan kedu ke Gedong Tataan dengan sistem diberikan modal awal oleh Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1905 para kolonis membentuk sebuah Desa baru yang diberikan nama Bagelen yang merupakan Desa kolonisasi pertama, kemudian disusullah pembentukan 4 Desa berikutnya yang berkisar ditahun 1906-1911. Setiap Kepala keluarga memperoleh sebanyak 30 are pekarangan atau perkebunan atau tanah untuk tempat tinggal dan 70 are lahan sawah dan untuk pembiayaan transportasi akan ditanggung oleh penyelenggara proyek selama 2 tahun.

Seiring berjalannya waktu, kolonisasi di Gedong Tataan ini ternyata menghabiskan jumlah biaya yang sangat mahal, sehingganya munculah ide baru dari Pemerintah Belanda yang tidak ingin rugi dan mengusulkan agar pembiayaan kolonisasi ditanggung oleh pelaksana perintis atau kolonis. Sejak tahun 1912 sistem kolonisasi fase percobaan yang di Gedong Tataan diubah sistemnya menjadi sistem pelaksanaan dengan sistem hutang atau pinjaman bank, yaitu *Lampongs Volksbank* yang ditugasi untuk memberikan pinjaman dana kolonisasi. Akhir tahun 1921 jumlah kolonis yang berada di Gedong Tataan mencapai 19. 572 orang. Jumlah kolonis yang begitu banyak di Gedong Tataan

ini mengakibatkan kondisi daerah ini mengalami kepadatan penduduk dan hampir penuh, sehingganya Pemerintah Belanda melakukan perluasan. Dalam memenuhi kekurangan tahan tersebut, maka Schalwijk sebagai pimpinan kolonisasi membuka kolonisasi yang kedua di Wonosobo pada tahun 1921 juga yang terletak kira-kira 10 km dari Kota Agung.

Menurut Sjamsu (1960) Kolonisasi Wonosobo ini hanya berlangsung selama dua tahun. Kolonisasi yang hanya dilaksanakan selama dua tahun ini dikarenakan kondisi Wonosobo yang juga sudah mulai mengalami kepadatan penduduk dan penuh. Melihat kondisi pengeluaran yang begitu banyak, dan siklus penghematan biaya, maka pada tahun 1923 Pemerintahan Belanda mulai menghentikan pengiriman kolonis dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Namun, jika ada rakyat atau kolonis yang ingin melakukan kolonisasi diluar pulau Jawa, maka seluruh biaya yang dikeluarkan kebanyakan adalah biaya mandiri dan sukarela. Pada tahun 1923 dan 1924 daerah-daerah kolonisasi Lampung terutama Kota Agung, ditimpa musibah hama tikus, hal ini mengakibatkan hutang kolonis semakin besar dan banyak sekali kolonis yang memilih untuk meninggalkan tanah kolonisasi dan kembali ke tempat asalnya dikarenakan tidak sanggup menanggung banyaknya beban hutang.

Berikut tabel kenaikan jumlah penduduk dimasing-masing tanah kolonisasi dari tahun 1923-1927 menurut Sjamsu (1960:6) :

Tabel 6. Daftar jumlah kenaikan penduduk kolonis di tanah Lampung

No.	Tahun	Gedong Tataan	Kota Agoeng	Djumlah
1.	1923	19. 823	4. 288	24. 111
2.	1924	20. 144	5. 927	26. 071
3.	1925	20. 650	5. 558	26. 208
4.	1926	21. 234	3. 556	24. 790
5.	1927	21. 837	3. 337	25. 164

Sumber : Sjamsu, M.A. 1960. *Kolonisasi*.

Kenaikan jumlah penduduk berdasarkan tabel diatas ini diakibatkan karena kenaikan angka kelahiran dan kolonis sukarela.

Pada tahun 1926, selama perjalanan kolonisasi terdapat sebuah kecurangan-kecurangan dari sistem pembiayaan yang menyeret Pimpinan *Lamongsche Volksbank* yaitu W. C. Schalwijk, sehingga ia harus diberhentikan dari jabatannya dan dipecat dan kemudian digantikan oleh Residen M. C.

Ingram, seorang *Gezaghebber* (Letnan Gubernur) di Teluk Betung. (Amboro, 2021:228)

Pada tahun 1928, diadakan kembali pengiriman kolonis dari Jawa ke Lampung kolonisasi sukarela ke Gedong Tataan. Biaya yang dikeluarkan ini hanyalah biayasukarela dan disediakan untuk biaya pengangkutan saja, sedangkan ditanah kolonisasi para kolonis harus mengurus dirinya sendiri. Dalam percobaan ini berhasil mengirimkan 438 keluarga. Pada tahun 1929 kolonisasi sistem pinjaman hutang sudah dihapuskan karena deficit keuangan yang berlebihan dan mengakibatkan pengeluaran biaya yang begitu banyak.

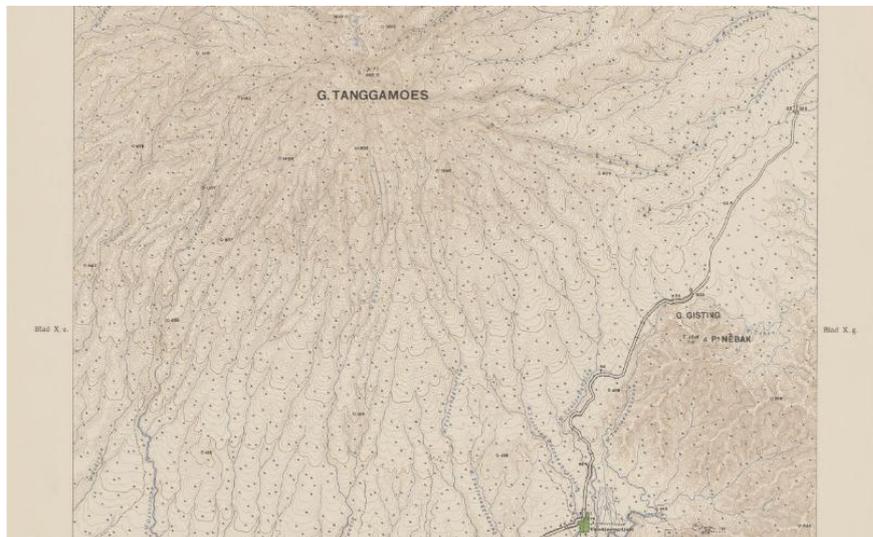
Pada tahun 1932, mulai timbul desakan-desakan Pemerintah Belanda untuk menyelenggarakan kolonisasi kembali, berhubungan dengan dihapuskannya *koelie ordonantie*. Sebagian besar para kolonis yang melaksanakan kolonisasi ditahun 1932 ini ditempatkan disuatu Desa kolonisasi yang dibuka dalam tahun saat itu juga, seperti Gedong Dalam, dan Kolonisasi Sukadana. Dalam perjalanan kolonisasi ini satu tahun kemudian yaitu tahun 1933 tidak diakan pengiriman kolonis yang baru guna untuk kepentingan penyelidikan hasil. Di Gedong Dalam ini dilakukan pembukaan daerah kolonisasi yang besar yang disebut dengan kolonisasi Sukadana yang memiliki luas sekitar 47. 000 bouw atau bau yang secara dengan 0,75 hektar. (Pelzer, 1948; Sjamsu, 1960; Amboro, 2021). Selang satu tahun berikutnya, yaitu ditahun 1934 dimulai ada perencanaan baru untuk pembukaan baru di wilayah hutan milik warga Buay Unyi dan Buay Nuban yang diberi nama Kolonisasi Sukadana (Amboroetal. , Kuswono et al. , 2020; Pelzer, 1948; Sjamsu 1960). Daerah kolonisasi Sukadana ini kemudian diperluas lagi dnegan membuka daerah-daerah Way Seputih, Pengubuan, Punggur, Way Jepara, dan Raman (Sjamsu, 1960; Amboro, 2021)

Dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan program perluasan daerah ini, Pemerintahan Belanda melalui seorang controlling dalam memimpin *onderafdeling* Sukadana untuk melakukan persiapan negosiasi dengan masyarakat pribumi. (Kuswono et al. , 2020; Amboro, 2021). Pada tahun 1937 Pemerintah Belanda menyelenggarakan kolonisasi keluarga yang dipindahkan dari Jawa ke daerah tanah kolonisasi. Setiap kolonis diangkut oleh PemerintahBelanda kemudian setibanya di tempat, mereka diserahkan kepada kolonis-kolonis yang lebih dulu. Sistem kolonisasi ini dipelopori oleh H. R. Rookmaker, kolonisasi keluarga ini merupakan sebuah kolonisasi yang menjadi

sarana yang menjembatani untuk menuju kolonisasi sukarela secara besar besaran. (Sjamsu,1960).

### **C. Giesting sebagai pilihan *Indo-Eurpeesch Verbond* (I.E.V) melaksanakan kolonisasi di tahun 1926**

Giesting merupakan nama suatu daerah yang terkenal akan jejak kolonisasi kaum Indo-Eropa dan sudah ada sejak zaman masa kolonisasi dahulu. Pemerintahan Belanda telah memetakan letak lokasi Giesting yang berada di Tanggamus dengan wilayah daerah yang berdekatan dengan kaki Gunung Tanggamus. Pada tahun 1909, daerah Giesting sudah masuk dalam peta wilayah Lampung oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Penggambaran wilayah Topografi Karesidenan Sumatera Distrik Lampung. Dalam pemetaannya, Giesting ditandai dengan huruf “G” dan Gunung Tanggamus dilambangkan dengan huruf “G. Tanggamoos. Dari wilayah yang tertera pada Peta Penggambaran Belanda tahun 1909 wilayah Giesting yang ditandai dengan huruf G didepan kata Giesting mengindikasikan bahwa wilayah Giesting nampaknya terletak disebuah Gunung yang ketinggiannya jauh dibawah Gunung Tanggamus (2100 meter), atau setidaknya, Giesting merupakan sebuah bukit”. Penggambaran Giesting pada tahun 1909 atau tempo dulu



Gambar 2. Wilayah Giesting tahun 1909 (Sumber: [digitallcollections.universiteitleiden.nl](http://digitallcollections.universiteitleiden.nl))

Giesting yang saat ini telah menjadi bagian dari Kabupaten Tanggamus telah menyimpan jejak sejarah kolonisasi yang diselenggarakan oleh *Indo-*

*Europeesch Verbond* (I. E. V). Kabupaten Tanggamus adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Lampung dengan Ibukota berada di Kota Agung Pusat.

Pada tahun 1924, Mr. Kloer seorang simpatisan kaum Indo-Eropa mendaftarkan diri untuk bergabung di Pemerintahan *Indo-Europeesch Verbond* pusat. Meskipun, latar belakang Mr. Kloer adalah orang yang kaya raya, Mr. Kloer merasa iba dan simpatik terhadap nasib kaum Indo-Eropa yang ada di Hindia Belanda. Kemudian, di pertengahan tahun 1924 Mr. Kloer ditugasi oleh ketua *Indo-Europeesch Verbond* pusat untuk berpetualang dan menjelajah tanah Sumatera didekat Gedong Tataan. Pemerintah *Indo-Europeesch Verbond* (I.E.V) Pusat memberikan kebebasan untuk Mr. Kloer dalam melakukan penjelajahan tersebut dengan syarat tidak boleh mengganggu hukum adat sekitar, sehingganya Mr. Kloer bertemu dengan warga sekitar yakni pribumi Lampung dan telah memutuskan bahwa ada sebuah daerah yang masih asri dan belum banyak yang bertempat tinggal disitu. Nama daerah tersebut yaitu Gisting atau yang saat ini dikenal sebagai Gisting. Adolf Kloer mengungkapkan bahwa :

“Papa saya dulu adalah seorang pengembara asli, beliau simpatisan kaum Indo-Eropa, padahal beliau itu orang kaya raya punya pabrik gula di Jawa. Kemudian papa saya disuruh sama Pemerintah pusat *I.E.V* yang diketuai oleh *Deg Din Hog* saya sedikit lupa namanya, untuk melakukan pemburuan lahan yang akan dijadikan tempat kolonisasi menggunakan dodolit alat buru jaman dulu. Kemudian menemukan Gisting ini, karena daerah yang tidak mengganggu hukum adat lampung asli”. (Adolf Kloer, Wawancara 07 Februari 2022)

Dalam pelaksanaan pemilihan tempat Kolonisasi kali ini, juga telah mengikuti pertauran yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Hindia-Belanda pada waktu itu. Terdapat Undang-undang Agraria oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda (*Algemene Strafwetboek*) Pasal 62 *Regeeringsreglement* yang berisikan tentang hak-hak penduduk atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan harus dihormati dan dijaga sepenuhnya. Perlindungan tanah-tanah Pribumi yang berada di sekitar Gisting ataupun di daerah lain juga merupakan langkah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Hindia-Belanda pada masa itu. Pada Undang-Undang Agraria (*Agrarisch Wet*) *Staatsblad* 1870 No. 55 berisi tentang perlindungan kepentingan rakyat Pribumi berkaitan dengan hak-hak tanahnya dan ini merupakan salah satu bentuk janji Pemerintahan Hindia-Belanda dalam menjamin hak-hak tanah Pribumi. (Vollenhoven, 2020:159).

Sudah sejak dahulu lamanya, baik di Jawa maupun luar Jawa terdapat suatu aturan hukum adat yaitu tanah-tanah pertanian menjadi hak utuh ulayat Desa. Hukum adat mengenal Desa-Desa dimana masih terdapat hak ulayat Desa tersebut atas tanah dan sawah.

Mr. Kloer kemudian melaporkan kepada Pemerintah Pusat *I.E.V* De Hoog, bahwa daerah "Gistang" bisa dijadikan kolonisasi untuk Indo-Eropa. Hingga kemudian, Pemerintah Pusat *I.E.V* menyetujuinya dan meminta Mr. Kloer untuk memimpin kolonisasi Indo-Eropa di Gistang ini atau yang saat ini namanya Giesting yang menjadi populer dengan nama Gisting.

Giesting merupakan Kolonisasi yang dilaksanakan oleh kaum Indo-Eropa sejak tahun 1926. Namun, Kolonisasi yang dilakukan di Giesting kali ini berbeda dengan kolonisasi yang ada di Lampung seperti di Sri Basuki, Gedong Tataan dan Kota Agung. Kolonisasi yang dilakukan di Giesting adalah dengan cara memindahkan kaum Indo-Eropa untuk berpindah dan bertani di daerah Giesting. Sedangkan Kolonisasi yang ada di daerah Gedong Tataan dan Kota Agung adalah memindahkan orang asli Jawa untuk mengurus pertanian. *De Kourier* (1932) memberitakan tentang *I.E.V* yang dihadapkan pada tugas mengubah pekerja kantoran, pengawas, dll. menjadi petani yang mencari nafkah dari tanah.

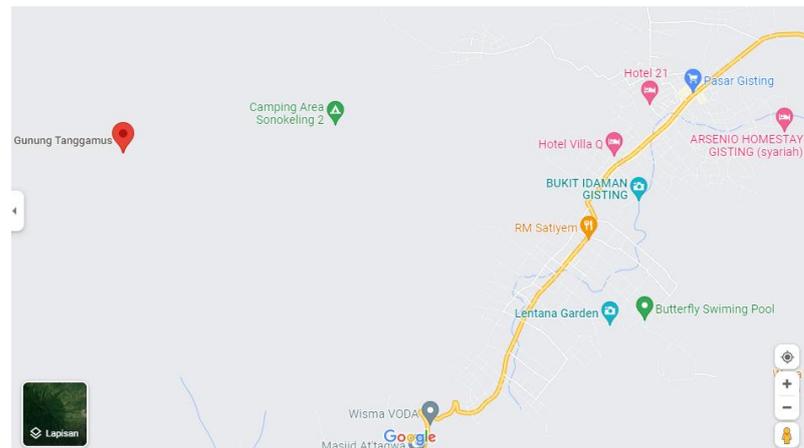
Kolonisasi yang telah diselenggarakan di Giesting ini adalah kolonisasi yang diperuntukkan untuk kaum Indo-Eropa dan bertujuan khusus dan terfokus dalam kolonisasi pertanian. Kolonisasi yang dilaksanakan dengan melakukan perpindahan kaum Indo-Eropa untuk melanjutkan kehidupan baru ditempat yang baru. Pertanian yang dilakukan adalah sejenis menanam kopi, membuka lahan perkebunan baru untuk tanaman dan sayur-sayuran. Kaum Indo-Eropa menunjukkan eksistensi agar tidak hanya sekedar menyanding darah Eropa yang mengalir pada tubuh mereka, dengan semangat untuk memajukan kaum Indo-Eropa, mereka yang datang di daerah Giesting, kemudian berusaha mewujudkan rencana untuk membuka lahan perkebunan kopi guna mewujudkan cita-cita kelompok mereka. Pada tahun 1926 lahan perkebunan kopi ini awal mulanya masih berbentuk hutan belantara, namun kemudian mereka menebang pohon-pohon besar dan membakarnya

Bermula dari sebuah kelompok yang bernama *I.E.V* (*Indo-Europeesch Verbond*) atau keturunan Indo-Eropa, para Kolonis yang berada di daerah Giesting menginginkan kemajuan dan kemandirian, dikarenakan Giesting merupakan sebuah dataran tinggi, yang subur dan strategis.

“The Giesting sekarang memiliki perhatian semua orang dan harus berhasil, IEV harus menunjukkan bahwa ia ingin berarti sesuatu di bidang pertanian. hal mengusulkan mosi yang mewujudkan harapan bahwa divisi akan dengan penuh semangat mendukung”. (De Nieuwe Vorstenlanden, 1927)

Keseriusan *Indo-Europeesch Verbond* (I.E.V) dalam menginginkan kemandirian, sehingganya mereka memilih Giesting, (Sjamsu,1960) juga menyebutkan bahwa “hasil pertanian jang begitu subur” atau dalam artian hasil pertaniannya begitu subur dikarenakan kondisi tanahnya yang mendukung. De Kourier (1932) memberitakan tentang eksperimen yang dilakukan oleh *Indo-Europeesch Verbond* (I.E.V) telah mengalami beberapa ujian, bukan tanpa kekecwaan namun lebih baik dari pada di wilayah lain seperti yang dilaksanakan pribumi di Gedong Tataan. Kondisi Giesting yang sangat bagus untuk daerah pertanian, memang sudah terkenal sejak lama, jika dibandingkan dengan wilayah Kota Agung ini jauh berbeda. Perbedaan lahan Kota Agung yang rawan tandus dan pertama tama harus dibuat kering dan subur. Wabah malaria yang dimana orang Jawa pada waktu itu ke wilayah lain sehingga mengakibatkan daerah disekitar Giesting mengalami Kepadatan penduduk, sehingga wilayah Giesting ini dirasa tepat untuk melakukan kolonisasi pertanian oleh Kaum Indo Eropa. (De Kourier, 1932)

Pemerintah Hindia Belanda juga memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang diinginkan oleh kaum Indo-Eropa dalam meningkatkan kemandiriannya. , 1927. “*Regeerings steun aan de Lampong Kolonisten*”, 1927 Memberitakan bahwa Pemerintah memberikan dukungan financial yang sangat efektif untuk para pemukin Indo-Eropa di tanah kolonisasi. Pemerintah memberikan ruang di Giesting yang dekat dengan lokasi kolonisasi pertama yaitu Kota Agoeng sampai bahasan tentang kolonisasi ini telah dibahas oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada den Direktur Binnen atau landjshBestnur yang akan membahas tentang pertanian dan dasar-dasar bantuan dalam mencapai tujuan kolonisasi untuk kaum Indo-Eropa. (Aglemeen Handelsblad voor Nederlandsch indie, 1927). Berikut adalah penggambaran Daerah Gisting saat ini yang masih sama letaknya sejak tahun 1909 yang berdekatan dengan Gunung Tanggamus.



Gambar 3. Peta Daerah Gisting. (Sumber : google maps)

#### D. Segi Pedagogis

Pelajaran yang dapat dipetik dari latar belakang pelaksanaan Kolonisasi di Lampung ini adalah sebuah usaha untuk merubah kehidupan lama dikehidupan baru dengan cara memindahkan masyarakat Indonesia dari tanah Jawa ke daerah Indonesia lainnya seperti pulau-pulau yang ada disekitarnya. Adanya kolonisasi ini, dikarenakan sebuah tuntutan politik etis atau politik balas budi dari Pemerintah Belanda untuk rakyat Indonesia, melihat kondisi rakyat Indonesia pada waktu itu yang semakin tertindas, jumlah kenaikan penduduk yang meningkat, perekonomian yang sulit dan kemiskinan yang meraja lela. Kolonisasi pertama kali dilaksanakan di Lampung yaitu Gedong Tataan. Lampung dipilih untuk kolonisasi pertama kali dikarenakan, kondisi daerah yang dekat dengan Pulau Jawa, dan daerah tanah yang masih luas untuk dimasuki penduduk yang baru serta potensial kondisi tanah yang subur dan bagus untuk kehidupan.

Pelajaran sejarah singkat yang dapat dipetik dari latarbelakang pelaksanaan kolonisasi oleh Pemerintah Belanda adalah selain untuk penghidupan yang layaknamun tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan buruh tani untuk masa yang akan datang di Lampung ini adalah kolonisasi sudah ada sejak zaman sebelum penjajahan Indonesia. Kolonisasi yang ada di Indonesia ditujukan untuk pemerataan penduduk dan perbaikan kualitas kehidupan. Van De Venteer adalah salah satu tokoh penggagas kolonisasi ini sebagai politik hutang budi dari Pemerintah Belanda untuk Indonesia. Dalam Politik etis ada tiga trias yaitu Emigrasi, Edukasi, dan Irigasi. Kolonisasi merupakan bagian yang mencangkup trias tersebut.